



Judul : Awas, solar bersubsidi rawan diselewengkan
Tanggal : Sabtu, 25 Juni 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Disparitas Harga Mencolok Awas, Solar Bersubsidi Rawan Diselewengkan

SENAYAN meminta Pemerintah mengawasi ketat distribusi solar bersubsidi. Bahan bakar ini sangat rentan diselewengkan karena ada disparitas harga yang mencolok dengan solar industri. Hal ini akan sangat merugikan dan membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jangan sampai rakyat sulit mengakses solar bersubsidi, karena banyak diselewengkan," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Diketahui, harga solar bersubsidi sebesar Rp 5.150 per liter dan solar industri sebesar Rp 10.726 hingga Rp 11.365.

Bambang meminta Pemerintah harus memikirkan daya beli masyarakat yang menurun. Subsidi harus kudu diberikan kepada rakyat.

"Kita tidak menginginkan subsidi tersebut disalahgunakan untuk mengambil keuntungan," kata Bambang.

Politikus Gerindra ini mengusulkan, salah satu upaya Pemerintah dalam mengawasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah dengan digitalisasi SPBU. Dengan perangkat digital yang terpasang di semua SPBU, petugasnya bisa memonitor semua kendaraan yang masuk untuk mengisi bahan bakar.

"Ada video analitik yang mencatat pengeluaran BBM di SPBU, sekaligus melihat pelat kendaraan yang masuk," ujar wakil rakyat asal dapil Jatim IV ini.

Dengan adanya digitalisasi SPBU, lanjutnya, transaksi pembelian BBM tercatat lengkap dengan nomor polisi dan dimonitor melalui perangkat video analitik. Ini menjadi hal

penting dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menambahkan, Pemerintah kudu meningkatkan volume dan besaran subsidi solar dalam APBN 2023. Sebab, setelah pandemi melandai, kegiatan sektor industri masih terkendala akan pasokan dan harga solar di berbagai daerah.

"Padahal, kebutuhan BBM solar untuk industri dan transportasi akan meningkat. Tanpa adanya kenaikan jumlah pasokan, tentu ini akan menimbulkan kerawanan bagi terjadinya kelangkaan BBM," kata dia.

Menurut Mulyanto, beban kenaikan harga minyak dunia tidak harus ditimpakan kepada masyarakat berupa kenaikan harga solar. Beban tersebut kudu ditanggung Pemerintah yang bertindak sebagai *shock absorber* atas kenaikan harga energi dunia.

Politikus PKS ini mengusulkan agar subsidi pada tahun 2023 untuk BBM jenis solar ini dinaikkan dari Rp 500 per liter menjadi Rp 3.500 per liter. Ini untuk menyesuaikan dengan kenaikan ICP (harga minyak mentah Indonesia) yang menyentuh angka 100 dolar AS per barel.

"Pembahasan terkait besaran subsidi tetap solar ini, memang cukup alot. Mengingat tambahan anggaran ini relatif besar," ungkapnya.

Komisi VII DPR dan Menteri ESDM, lanjutnya, sepakat pada angka subsidi tetap solar Rp 3.000 per liter. Dengan angka tersebut, berarti terjadi kenaikan subsidi solar sebanyak enam kali lipat dari subsidi tetap solar yang ada sekarang, yakni sebesar Rp 500 per liter. ■ TIF